

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gresik telah dikenal sejak abad ke sebelas saat tumbuh menjadi pusat perdagangan antar pulau dan negara. Tahun 1617 Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro pada menjadi bupati pertama Gresik. Semula kabupaten ini bernama kabupaten Surabaya, dengan dilaksanakannya PP Nomer 38. Pada tahun 1974, semua kegiatan pemerintahan mulai dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat pemeritahan di Kota Gresik.

Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertausila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Gresik juga masuk ke 9 daerah yang sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatan utamanya difokuskan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbang kertosusila dan juga sabagai wilayah industri, maka kota gresik menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di seluruh dunia yang ditandai dengan lahirnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.

Semakin berkembang dan mahsyurnya kota Gresik, ternyata juga diiringi dengan peningkatan prestasi dari aspek akuntabilitas. Setelah sekian lama Gresik selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akhirnya Pemda Gresik mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Andi, 2016). Penghargaan ini merupakan kerja keras esekutif dan

legeslatif yang selama ini bersama-sama selalu mengadakan perbaikan kinerja. Karena adanya perubahan manajemen, berupa perbaikan pada pengelola dan manajemen asset daerah dengan lebih detail.

Sebelumnya, Pemda Gresik selalu mendapat opini WDP untuk beberapa periode pembukunannya. Salah satunya adalah terhambatnya penyelesaian utang anggota DPRD Gresik periode 1999-2004, berupa uang tali asih atau uang pengabdian Rp 30 juta (Sugiyono, 2015). Tidak hanya itu, tetapi juga terkait dengan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) di DPRD Gresik yang nilainya Rp 60 juta yang masih menjadi hal yang dipertanyakan. Menurut Syafi'i uang tersebut dibawa oleh dua orang mantan anggota DPRD Gresik yang tidak ditarik (Sugiyono, 2015).

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan zaman yang pesat, aktivitas organisasi juga turut berkembang. Keadaan seperti ini tentunya dapat menyebabkan organisasi bertambah besar dan memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dalam mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Salah satu usaha organisasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melalui akuntansi pertanggungjawaban untuk mengukur hasil kinerja yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban. Manajemen yang bertanggungjawab atas perencanaan, pencapaian sasaran pelaksanaan, dan hasil pelaporan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melalui akuntansi pertanggungjawaban.

Dengan demikian, manajemen harus memperhatikan kinerja pusat pertanggungjawaban agar dapat berjalan dengan efektif. Akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan manajemen bertujuan untuk memeriksa keefektifan penyelesaian rencana dan untuk mendeteksi penyimpangan yang

mungkin terjadi. Menurut Damayanti (2004) apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam rencana kebijakan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Pengendalian dapat dilakukan salah satunya dengan cara melimpahkan wewenang ke dalam suatu departemen. Kinerja departemen akan dinilai berdasarkan pelimpahan wewenang dan tugas ke dalam departemen atau divisi yang masing-masing memiliki suatu kendali terhadap wewenang tersebut.

Perusahaan yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban akan membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada proses yang berskala kecil dan sedikit aktivitas dan sederhana, pada umumnya pimpinan perusahaan dapat mengendalikan semua aktivitas dan permasalahan yang dihadapinya. Namun dengan bertambah besarnya perusahaan, maka pimpinan tidak mungkin dapat mengendalikan secara menyeluruh aktivitas dan masalah yang timbul dalam perusahaan (Muharam, 2011). Untuk itu pimpinan harus mengadakan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang sangat penting ke tingkat pimpinan di bawahnya (para pelaksana) dalam pengambilan keputusan sehingga masalah yang ada dapat ditangani lebih baik dan cermat. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang akan timbul berbagai tingkat tanggungjawab dan wewenang dalam suatu perusahaan, oleh karenanya perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban (Lestari, 2011).

Menurut Mulyadi (2004:218) pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada di bawah pengawasannya (Sriwidodo, 2010).

Menurut sistem ini, unit-unit yang ada dalam organisasi dibagi menjadi pusat pertanggungjawaban yaitu pusat biaya, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat investasi. Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan yang secara individual serasi, selaras dan seimbang dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jejang hirarki dalam organisasi investasi (Hansen dan Mowen, 2005). Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi di dalam pusat yang dipimpinnya dan secara periodik manajer tersebut akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan (Sriwidodo, 2010).

Pelaksanaan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara objektif karena menjadi salah satu penentu kebijakan perusahaan di masa depan. Pelaporan pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai salah satu alat penilaian kinerja atau prestasi terhadap para manajer tingkat bawah. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya tolok ukur penilaian prestasi akan mendorong dan memotivasi para pelaksana pada pencapaian tujuan perusahaan (Muharam, 2011). Menurut Mangkunegara (2005:71) pengertian prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Menurut Viyanti & Se Tin (2010) dalam penilaian prestasi kerja, sangat diperlukan sistem pelaporan yang dapat memantau kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap prestasi kerja pegawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa hal berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai bentuk atau pengejawantahan metode ilmiah dalam melakukan pengkajian terhadap suatu fenomena, dalam hal ini memprediksi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai stimulus prestasi kerja pegawai.

2. Bagi dunia akademis

Riset ini dapat menjadi tambahan bahan rujukan atau referensi bagi riset selanjutnya dengan topic yang berhubungan. Selain itu, secara akademis, riset ini

merupakan tulisan sederhana peneliti dalam rangka mengaktualisasikan hasil pengkajian terhadap topik yang diteliti.

3. Bagi dunia praktisi

Secara praktis riset ini bermanfaat untuk pengaplikasian teori serta konsep akuntansi pertanggungjawaban untuk mendukung prestasi kerja pegawai.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian Anwar (2013) tentang pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap prestasi kerja pada PT. Telkom Witel Jawa Timur (Jember). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap prestasi kerja pada PT. Telkom Witel Jawa Timur (Jember). Dalam penelitian ini sejumlah 31 orang yang terpilih sebagai subjek penelitian. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Natalya dan Kusumawardani (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuisisioner sebanyak 40 eksemplar, tetapi hanya 37 kuisisioner yang dapat dianalisis dan diproses. Kuisisioner dibagikan kepada responden yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Balikpapan. Data

Sari (2013) bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. Penelitian

ini dilakukan di kantor pelayanan PT. Pos Indonesia di kota Jambi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 31 responden yang terdiri dari para menejer dan pengurus cabang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada lokasi atau objek penelitian yang berbeda, yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian ini juga menambah khasanah riset terkait akuntansi pertanggungjawaban untuk memprediksi prestasi kerja pegawai yang berkecimpung pada sektor publik.